

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Kabupaten Pekalongan

Halaman 16

## PAD Sektor Pertambangan Belum Optimal

**KAJEN** - Aktivis LSM Forlindo Kabupaten Pekalongan menilai pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan masih belum optimal. Mereka menilai dalam satu tahun, retribusi mineral golongan C bisa mencapai Rp 60 miliar, namun pemerintah daerah hanya menargetkan pendapatan dari sektor ini Rp 900 juta.

"Kami menyuarakan optimalisasi penerimaan daerah dari pajak daerah atau retribusi daerah, yakni retribusi mineral golongan C. Potensi pertahunnya bisa mencapai Rp 60 miliar, namun target yang diberikan oleh DPRD melalui Perda APBD 2018 hanya Rp 900 juta, dan ada beberapa perusahaan besar dari mulai pertama menambang sampai sekarang belum membayar retribusi itu," ujar perwakilan LSM Forlindo, Sakdullah, ditemui usai audiensi dengan DPRD Kabupaten Pekalongan di Gedung Dewan, Rabu (9/5) siang.

Kecilnya pemasukan daerah

dari sektor pertambangan tersebut, kata dia, tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh praktik usaha pertambangan itu. Ia mencontohkan, kerusakan jalan di beberapa ruas jalan di kabupaten cukup parah akibat dilalui arma-

da pengangkut material tambang mineral tersebut.

### ■ Kesulitan

Di sisi lain, kata dia, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) selama ini kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infra-

struktur jalan dan sebagainya.

"Jika tidak disikapi dalam waktu dekat akan kita laporkan ke ombudsman atau BPK. Tadi jawaban dari DPKAD akan menjawab tuntutan masyarakat LSM Forlindo segera untuk menyelesaikan, tapi tidak bisa muluk-muluk. Lha nanti kita tunggu," katanya.

Selain itu, aktivis LSM ini juga akan melaporkan beberapa pengusaha tambang karena tidak membayar retribusi. Padahal mereka berkontribusi dalam merusak jalan. Disinggung soal jumlah galian C di Kabupaten Pekalongan, Sakdullah menyatakan, usaha galian C tanah urug dan galian saja ada 40 titik. Jumlah itu, kata dia, belum termasuk usaha pengolahannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ahmad Kozin, mengatakan, untuk infrastruktur jalan yang rusak pemda agar segera memperbaiki secepatnya. ■ *haw-ad*